

**OPTIMALISASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENEGAKAN PERDA BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG  
KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KABUPATEN BULELENG**

**Oleh**

**Ricky Simarmata, NIM 2014101105**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan mengevaluasi tanggung jawab dan wewenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum khususnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di Kabupaten Buleleng. (2) Untuk mengetahui dan mengkaji beberapa hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum, khususnya mengenai pedagang kaki lima di Kabupaten Buleleng. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder serta ciri penelitian deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini. Setelah selesai penelitian, temuan dan kesimpulan sebagai berikut dicapai: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Unit Polisi Pamong Praja mengatur tanggung jawab dan wewenang Satpol PP. Ketika pedagang kaki lima melanggar Peraturan Daerah Buleleng Nomor 6 Tahun 2009, Satpol PP Kabupaten Buleleng memberikan arahan, pengawasan, dan tindakan penegakan hukum. (2) penegakan Perda Buleleng yang dilakukan oleh Satpol terhadap PKL di Kabupaten Buleleng belum optimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yakni faktor penegak hukum dimana minimnya anggota Satpol PP yang PPNS, faktor sarana prasarana penunjang penegakan hukum, serta faktor masyarakat (PKL) di Kabupaten Buleleng yang kurang terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Untuk mengatasi hambatan tersebut adapun upaya yang dapat diberikan yakni memberikan sanksi yang tegas terhadap PKL yang terus-menerus melanggar Perda Buleleng Nomor 6 tahun 2009, melakukan peningkatan sumber daya serta profesionalisme kinerja Satpol PP, melakukan peningkatan koordinasi dari masing-masing instansi kecamatan terkait serta operasional rutin, dan melaksanaknakan tindakan pencegahan dan pembinaan secara bekal melihat masih rendahnya kesadaran masyarakat (PKL) guna menciptakan ketertiban dan kebersihan.

**Kata Kunci :** Optimalisasi, PKL, Ketertiban Umum, Satpol PP, Peraturan Daerah

**OPTIMIZING THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN  
ENFORCING BULELENG REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2009  
CONCERNING PUBLIC ORDER AGAINST STREET VENDORS IN  
BULELENG DISTRICT**

**By**

**Ricky Simarmata, Student ID Number 2014101105**

**Law Study Program**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to (1) determine and evaluate the responsibilities and authority in enforcing Buleleng Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Public Order, especially those relating to street vendors in Buleleng Regency. (2) To find out and study several obstacles and problems in implementing Buleleng Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Public Order, especially regarding street vendors in Buleleng Regency. Empirical legal research using primary and secondary data types as well as descriptive-analytical research characteristics is used in this research. After completing the research, the following findings and conclusions were reached: (1) Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units regulates the responsibilities and authority of Satpol PP. When street vendors violate Buleleng Regional Regulation Number 6 of 2009, the Buleleng Regency Satpol PP provides direction, supervision and law enforcement action. (2) enforcement of the Buleleng Regional Regulation carried out by the Satpol against street vendors in Buleleng Regency is not yet optimal because there are still obstacles, namely law enforcement factors where the minimum number of Satpol PP members are PPNS, infrastructure factors supporting law enforcement, as well as community factors (PKL) in the Regency Buleleng lacks awareness of the law itself. To overcome these obstacles, efforts that can be made include providing strict sanctions against street vendors who continuously violate Buleleng Regional Regulation Number 6 of 2009, increasing the resources and professionalism of the Satpol PP's performance, increasing coordination from each related sub-district agency and operations. routinely, and carry out regular preventive and coaching measures considering the low level of public awareness (PKL) in order to create order and cleanliness.*

**Keywords:** *Optimization, Street Vendors, Public Order, Satpol PP, Regional Regulations*